

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI DESA BAJULAN KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK

Wella Rega Evtasari

S1 Ilmu Administrasi Negara , FISH, UNESA (wellare@gmail.com)

Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si

Abstrak

Partisipasi masyarakat menjadi prasyarat utama yang mencakup semua aspek pelaksanaan pembangunan daerah mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Masyarakat menjadi posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Demikian pula untuk program pemerintah seperti Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di Desa Bajulan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Sementara itu, fokus penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di Desa Bajulan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang dilihat dari bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di Desa Bajulan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk sudah cukup baik dilihat dari pelibatan masyarakat dalam terbentuknya suatu lembaga masyarakat, serta adanya sumbangsih pemikiran dari para anggota untuk memajukan suatu program/kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan seperti partisipasi tenaga dalam pembersihan semak, pemanenan getah pinus, pengamanan hutan, dan partisipasi harta benda secara swadaya. Partisipasi dalam pengambilan manfaat mendapatkan tambahan penghasilan dari tanaman yang dikelolanya untuk dijual sendiri. Pada partisipasi dalam evaluasi, pihak yang berwenang menilai yaitu dari tingkat Perhutani KPH Kediri bersama Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Namun, dari beberapa kegiatan masih terdapat beberapa kekurangan terkait program ini seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan dalam pengambilan keputusan terlalu didominasi oleh pihak perhutani dalam pembentukan perjanjian kerjasama dan lebih mengutamakan SOP daripada kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci : Partisipasi, Partisipasi Masyarakat, Program

COMMUNITY PARTICIPATION IN COLLABORATIVE FOREST MANAGEMENT WITH COMMUNITIES PROGRAM IN THE BAJULAN VILLAGE SUBDISTRICT LOCERET DISTRICT NGANJUK

Wella Rega Evtasari

S1 Ilmu Administrasi Negara , FISH, UNESA (wellare@gmail.com)

Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si

ABSTRACT

Community participation into the main prerequisites that covers all aspects of the implementation of regional development from planning to evaluation. Society becomes an important position in the implementation process of development implemented by the government. Similarly for government programs such as the Collaborative Forest Management. The goal in this study to determine and describe the Community Participation in Forest Management Program In the Bajulan village subdistrict Loceret, Nganjuk.

This type of research used in this research is descriptive using a qualitative approach. The technique of making the data source in this study using snowball sampling techniques. Meanwhile, the focus of this study is Public Participation in Joint Forest Management Programme In the village of the District Bajulan Loceret Nganjuk seen from other forms of public participation that participation in decision making, participation in the implementation, participation in the benefits and participation in the evaluation.

The results showed that people's participation in the Joint Forest Management program in the village of the District Bajulan Loceret Nganjuk already pretty good views of community involvement in the formation of a public institution, as well as the contribution of ideas from members to advance a program / activity. Public participation in the implementation of such a significant participation in the cleaning bushes, pine resin harvesting, forest protection, and participation by non-government property. Participation in the benefits of getting additional revenue from the plant manages to sell itself. On participation in the evaluation, the authorities assess that the level of Perhutani KPH Kediri together associate personnel Society (TPM). However, from some of the activities there are still some shortcomings related to this program such as a lack of understanding of society and in decision-making is too dominated by the perhutani in the establishment of cooperation agreements and more priority than the needs of the community SOP

Keywords: Participation, Community Participation Program

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 1 ayat 1. Sebagai kesatuan ekosistem, hutan dibedakan fungsinya menjadi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi (BPS Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2014)

Pengelolaan secara kolaboratif antara fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi akan menciptakan suatu keseimbangan dan keselarasan ekosistem yang akan berdampak baik untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.

Namun, keanekaragaman hayati tersebut tidak diiringi dengan pengelolaan yang berkelanjutan sehingga pada prakteknya banyak sekali terjadi ketidakseimbangan ekosistem seperti perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian Negara maupun kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup.

Besarnya kerugian materi maupun non materi mendorong pemerintah untuk merevitalisasi hutan yang rusak dengan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan (*sustainable forest management*) salah satunya yang di sebut dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Sistem pengelolaan hutan yang sebelumnya memisahkan masyarakat sekitar hutan dengan hutan diubah menjadi sistem pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. Masyarakat sekitar hutan memiliki akses yang cukup untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan serta ditempatkan pada posisi sejajar dengan stakeholders lain. Melalui program di bawah naungan Perhutani, masyarakat dapat berpartisipasi dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Pada dasarnya pengelolaan hutan dan lingkungan sekitarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat bersama. Menggerakkan partisipasi masyarakat diperlukan untuk mendukung kegiatan dan program yang digerakkan oleh pemerintah di samping itu untuk meningkatkan perasaan ikut memiliki (*sense of belonging*) dalam setiap proses kegiatan khususnya dalam pelaksanaan program PHBM agar masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan hutan dan alam yang berbatasan langsung dengan wilayah mereka.

Program PHBM melibatkan partisipasi dari masyarakat desa untuk pengelolaan hutan yang tidak hanya bertumpu kepada hasil hutan kayu, tetapi meliputi seluruh pengelolaan sumberdaya hutan yang terkandung di dalam maupun permukaan lahan. Bentuk partisipasi masyarakat berupa pembuatan persemaian, penanaman dan pengelolaan bibit yang di alokasikan oleh Perhutani yang ditujukan untuk mengoptimalkan manfaat hutan bagi kesejahteraan masyarakat desa setempat.

Bajulan. Dalam melakukan partisipasi di dalam program PHBM, masyarakat Desa Bajulan

menggunakan saluran atau media dalam berpartisipasi sesuai dengan hak dan kewenangan. Salah satu media tersebut meliputi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Masyarakat Desa Bajulan berpartisipasi melalui LMDH, yaitu dengan memberikan usulan-usulan ataupun diskusi dalam rapat yang diselenggarakan oleh LMDH.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah peneliti sampaikan di atas, maka peneliti membuat sebuah rumusan masalah untuk mempersempit ruang lingkup masalah yang akan dikaji sehingga penelitian ini bisa fokus pada satu masalah yang dikemukakan. Adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah “Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk ?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, baik teoritis maupun praktis terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun manfaat yang ingin dicapai antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi teoritis pada kajian partisipasi masyarakat dan kebijakan publik dalam program pengelolaan hutan bersama masyarakat

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk.
- b. Bagi Perhutani diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan masukan terhadap perbaikan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.
- c. Bagi Pemerintah Desa dapat memberikan masukan untuk pelaksanaan Program

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat maupun program pembangunan lainnya.

- d. Bagi Universitas Negeri Surabaya hasil penelitian dapat menambah studi kepustakaan referensi literatur.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Konsep partisipasi dalam administrasi publik merupakan hal yang penting dalam mewujudkan nilai demokrasi. Dalam konsep pemerintahan yang demokratis, partisipasi masyarakat salah satu konsep yang vital karena berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dilihat dari asal katanya, partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (John M. Echols & Hasan Shadily, 2000: 419).

Pengertian tentang partisipasi juga dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001: 201-202) yang menyatakan bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. Pendapat tersebut mengungkapkan bahwa bentuk peran serta atau keterlibatan masyarakat dari sisi individu atau internal.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sukarela ataupun paksaan untuk berkontribusi dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

B. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi di bagi dalam beberapa tingkatan. Menurut Soegijoko dalam Huraerah (2011 : 114), terdapat tingkatan partisipasi dalam masyarakat, yaitu:

- a. Berbagi informasi bersama

Pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat atau mensosialisasikan program-program pemerintah dan mengajak warga masyarakat untuk

turun berperan serta dalam program-program tersebut. Konsultasi atau mendapatkan umpan balik Partisipasi yang dilakukan yaitu berupa pemberian pendapat oleh masyarakat akan sebuah program pemerintah sebelum program tersebut dilaksanakan, hal ini dilakukan guna mencapai kesuksesan implementasi program tersebut.

- b. Kolaborasi atau pembuat keputusan bersama

Meskipun masyarakat bukan pelaku utama pembangunan akan tetapi disini masyarakat dilibatkan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, dengan semakin kuatnya keterlibatan masyarakat ini dapat berpengaruh terhadap keputusan-keputusan pemerintah.

- c. Pemberdayaan

Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kendali dan otoritas yang kuat untuk menerima atau menolak keputusan pemerintah

Lebih lanjut Nasution (2009:21-23) memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi berperan penting dalam mencapai gagasan dan kesepakatan bersama. Dengan adanya komunikasi, aspirasi dapat tersampaikan sehingga pencapaian tujuan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

2. Pendidikan

Pendidikan sebagai aspek penting dalam berpartisipasi sebagai pengembangan dalam identifikasi tujuan pembangunan. Para pakar pembangunan menyatakan bahwa tingkat pendidikan berhubungan erat dengan tingkat partisipasi (Mubyarto dan Kartodiharjo (1998) dalam Nasution (2009:22). Tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi karena dalam menghadapi masalah global di masyarakat dibutuhkan manusia yang terampil, terdidik dan mempunyai kesadaran penuh dalam menghadapi tantangan pembangunan.

- C. Pekerjaan

Pekerjaan dianggap mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi dikarenakan semakin sibuknya seseorang dengan waktu yang terbatas maka kontribusi dalam pembangunan rendah, padahal syarat partisipasi yaitu adanya sumbang tenaga.

- D. Usia

Faktor usia juga dapat memengaruhi seseorang dalam partisipasi pengelolaan hutan bersama masyarakat. Seseorang yang berbeda usia akan berpengaruh dalam sikap dan cara berfikirnya. Dengan kelompok

usia tertentu masyarakat lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada individu.

E. Lama tinggal

Masyarakat berpartisipasi berarti berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Semakin lama masyarakat tinggal dilingkungan tertentu akan memiliki rasa memiliki lingkungan yang terlihat dari partisipasi kegiatan lingkungan setempat.

C. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Cohen dan Uphoff dalam Siti Irine Astuti D. (2009: 39-40) membedakan partisipasi menjadi empat bentuk, yaitu:

a. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

b. Partisipasi Dalam Pelaksanaan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan.

c. Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat.

Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

d. Partisipasi Dalam Evaluasi.

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi yang menjadi tempat dalam menggali informasi dalam penelitian ini yaitu di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Adapun teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Sementara itu, fokus penelitian ini adalah bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang dilihat menurut Cohen dan Uphoff dalam Siti Irine Astuti D. (2009: 39-40) yaitu Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan, Partisipasi Dalam Pelaksanaan, Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat dan Partisipasi Dalam Evaluasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif dari Miles dan Hubberman.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Dengan diberlakukannya Sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dicanangkan oleh Perum Perhutani pada tahun 2001 membuka kesempatan bagi masyarakat desa Bajulan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan. Masyarakat merasa terbantu karena program tersebut memperbolehkan *pesanggem* untuk mengolah lahan perhutani dengan tanaman palawija, hortikultura, tumpangsari, dll.

Keterlibatan aktif masyarakat dimulai dari terjalinnya kerjasama antara Perhutani dengan masyarakat desa hutan untuk mengelola hutan dengan prinsip partisipatif. Dengan adanya program PHBM tersebut penduduk yang tidak memiliki lahan sendiri akhirnya bisa memanfaatkan lahan dengan melakukan kegiatan bercocok tanam mengikuti program PHBM, yang kemudian dikenal sebagai *pesanggem*.

Para *pesanggem* yang mengikuti program tersebut harus turut menjaga tanaman tegakan, yang biasanya meliputi tanaman pokok kehutanan seperti jati muda, mahoni, trembesi, pinus termasuk menjaga dari pencurian atau hewan ternak dan serta membantu melaporkan ke pihak Perhutani apabila ada pohon/tegakan yang tumbang akibat bencana alam atau lainnya. Lahan yang ditanami pohon tersebut disediakan oleh pihak Perhutani dengan letak dan

luas yang telah ditentukan. Luas yang digarap oleh pesanggem yaitu 0,25 ha/pesanggem. Pembagian lahan garapan ini ditentukan oleh Ketua LMDH. Untuk dapat mengolah lahan Perhutani, masyarakat harus menjadi anggota aktif LMDH.

Awal pembentukan LMDH di desa ini karena masyarakat peduli dan ikut memikirkan keberadaan hutan untuk generasi mendatang. Masyarakat Desa Bajulan yang peduli dengan kelestarian hutan melakukan musyawarah tingkat desa yang difasilitasi pemerintah desa. Musyawarah ini menghasilkan pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Lembaga ini dimaksudkan untuk mewadahi kepentingan masyarakat dalam kepentingan pengelolaan hutan.

Setelah LMDH terbentuk, kemudian disusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk pelaksanaan dan pengelolaan sebuah lembaga. Anggota LMDH Wono Asri sampai saat ini berjumlah 120 orang, tetapi yang masih aktif dalam menggarap lahan Perhutani sebanyak 42 orang yang sebagian besar didominasi laki-laki.

Program PHBM secara yuridis tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Utama Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Kegiatan PHBM terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Sosialisasi dan Dialog

Sosialisasi dilakukan sebagai upaya pendekatan kepada masyarakat untuk memperkenalkan tentang penjelasan dari program PHBM. Sosialisasi dalam program PHBM merupakan tahapan krusial untuk merubah paradigma masyarakat untuk membangkitkan kepedulian sosial terhadap lingkungan. Pihak yang terlibat dalam sosialisasi diantaranya petugas atau tim dari Perhutani KPH Kediri maupun Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).

2. Kelembagaan

Tahap selanjutnya yaitu keberadaan suatu lembaga atau organisasi sebagai wadah kegiatan masyarakat desa hutan untuk mengakomodir segala kegiatan yang berkaitan dengan terlaksananya program PHBM. Unsur kelembagaan yang pertama di Desa Bajulan yaitu adanya kelompok tani hutan. Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah perkumpulan orang yang tinggal di sekitar hutan yang mengelompokkan diri dalam usaha-usaha di bidang sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota

3. Perjanjian

Perjanjian kerjasama merupakan ketentuan yang mengikat antara Perhutani dengan masyarakat desa hutan secara tertulis dan berkekuatan hukum. Perjanjian ini dibuat setelah LMDH dan pengurusnya terbentuk. Perjanjian ini bersifat mengikat kedua belah pihak dimana kegiatan PHBM agar tidak menimbulkan masalah.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan PHBM mulai diterapkan di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk mulai tahun 2003. Tahap pelaksanaan PHBM dimulai dengan persiapan lahan, kegiatan penanaman, kegiatan pemeliharaan dan penebangan. Penelitian ini menggunakan teori dari Cohen dan Uphoff dalam Siti Irine Astuti yang membagi partisipasi menjadi empat bentuk, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi.

a. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Masyarakat Desa Bajulan berpartisipasi melalui beberapa saluran/media. Saluran-saluran tersebut salah satunya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Lembaga adalah wadah dimana sekumpulan orang berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan bersama dan yang berfungsi mengatur akan kebutuhan bersama tersebut dengan nilai dan aturan bersama. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Bajulan mengadakan reorganisasi (penggantian) pengurus lama dengan pengurus baru setiap lima tahun sekali.

Pemilihan calon pengurus dilakukan untuk memenuhi kualifikasi sebagai pengurus LMDH yang kompeten melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Organisasi lembaga masyarakat desa hutan memiliki peranan vital dalam menjalankan kegiatan pengelolaan hutan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan warga Desa Bajulan seperti pendirian LMDH dan KTH berdasarkan musyawarah, adanya pertemuan rutin bulanan diharapkan mampu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan bisa tercapai.

b. Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Terdapat beberapa program kerja Perhutani yang melibatkan masyarakat dan berbagai pihak. Seperti

misalnya program kerja LMDH Wono Lestari dalam penyadapan getah pinus. Masyarakat Desa Bajulan bekerjasama dengan Perhutani dalam pemanenan getah pinus.

Penyadapan getah pinus dilakukan oleh petani hutan (*pesanggem*) dengan peralatan yang sudah disediakan oleh perhutani. Dalam pemanenan getah pinus, masyarakat berpartisipasi dengan menyediakan tenaga kerja. Penyadap hanya perlu untuk menyadap pohon-pohon pinus di petak lahan yang telah ditentukan Perhutani. Masing-masing *pesanggem* mendapatkan upah Rp.3.000,00 per kilogram getah yang berhasil disadapnya.

Bentuk partisipasi lain ditunjukkan dalam kegiatan pengamanan hutan. Pengamanan hutan adalah segala kegiatan, upaya dan usaha yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dan dukungan instansi terkait dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan secara terencana.

Pelaksanaan kegiatan PHBM di Desa Bajulan terdapat partisipasi lain, yaitu partisipasi harta benda. Partisipasi harta benda yang dimaksudkan adalah segala bentuk sumbangan secara materi / finansial. Partisipasi harta benda di tunjukkan dengan pembelian bibit tanaman yang dilakukan secara swadaya

c. Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat

Hutan di Desa Bajulan memberikan keuntungan dari segi materi berupa dana bagi hasil (*sharing*) kayu maupun non kayu yang dapat menunjang perekonomian masyarakat.

Hasil kegiatan PHBM dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan hasil usaha produktif. Bagi hasil hutan kayu diberikan oleh Perhutani kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan jika selama satu tahun petak lahan yang dikerjasamakan mempunyai kayu yang dipanen. Hasil hutan kayu yang menjadi obyek berbagi adalah kayu perkakas dan kayu bakar dari kawasan hutan produksi yang dikelola melalui proses PHBM. Sedangkan hasil hutan non kayu yang menjadi objek berbagi adalah hasil tanaman pertanian, tanaman holtikultura, hasil budidaya tanaman lain dan termasuk getah pinus.

d. Partisipasi Dalam Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan petugas Perhutani, Tenaga Pendamping Masyarakat bersama LMDH. Sesuai dengan Pedoman PHBM Plus 2009 tentang kegiatan supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan maksud untuk mengetahui pencapaian PHBM dengan cara membandingkan antara pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program PHBM di wilayah Desa Bajulan menunjukkan bahwa upaya LMDH dalam meningkatkan taraf tidak berjalan dengan baik karena rendahnya pemahaman *pesanggem* tentang program PHBM.

5. PEMBAHASAN

a. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan segala bentuk penentuan alternatif oleh masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam pemaparan sebelumnya terkait partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, masyarakat di Desa Bajulan berpartisipasi melalui saluran dalam bentuk lembaga, yaitu adanya LMDH dan Kelompok Tani Hutan (KTH).

Keberadaan LMDH berjalan dengan baik sebagai representasi masyarakat desa hutan, seperti halnya yang disampaikan oleh salah satu *pesanggem* Bapak Warso yang menyebutkan bahwa kegiatan pertemuan rutin diadakan tiap bulan untuk membahas kegiatan-kegiatan berkenaan dengan pengelolaan sumberdaya hutan. Sehingga dengan adanya pertemuan tersebut dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung.

Program kerja LMDH di Desa Bajulan dibagi menjadi program kerja PHBM oleh KPH Kediri dan program kerja PHBM oleh LMDH. Program kerja PHBM oleh KPH Kediri lebih banyak dirancang oleh Perhutani karena mayoritas kegiatan telah ditentukan oleh Perhutani seperti penyadapan getah, penentuan petak lahan dan jenis tanaman yang ditanami, dsb. Ada beberapa kegiatan yang Program kerja PHBM lebih banyak ditentukan pada keputusan di level atas seperti jajaran direksi, unit, dan KPH.

Pelaksanaan partisipasi dalam pengambilan keputusan di Desa Bajulan merujuk kepada strategi PHBM yaitu menerapkan Perencanaan Desa Partisipatif (PDP) atau metode yang lain yang dilaksanakan bersama masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan secara konsisten dan konsekuen yang kemudian mengintegrasikan hasil PDP dalam sistem perencanaan sumberdaya hutan. Hal ini terlihat dari kegiatan program PHBM yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat.

b. Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PHBM tergolong baik dan beragam antara

lain adanya partisipasi tenaga dalam proses penyiapan getah pinus yang dilakukan oleh pesanggem yang bergabung dalam KTH. Masyarakat berpartisipasi dengan menyediakan tenaga kerja yang berperan sebagai penyiap getah sedangkan segala keperluan penyiapan telah diatur dan disediakan oleh Perhutani.

Selanjutnya masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan dan pengamanan hutan. Masyarakat desa hutan setelah adanya PHBM saling mengawasi dan mencegah terjadinya kerusakan hutan baik sengaja ataupun tidak sengaja seperti yang tercantum dalam kewajiban masyarakat desa hutan dalam PHBM yaitu menjaga dan melindungi sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya bersama Perum Perhutani.

Pembagian luasan yang akan dikelola para pesanggem, dibagikan langsung oleh ketua LMDH dengan luasan yang sama rata untuk para pesanggem, setiap pesanggem diberikan lahan seluas 0,25 ha dipetak yang telah ditentukan.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan PHBM di Desa Bajulan terdapat partisipasi harta benda. Partisipasi harta benda yang dimaksudkan adalah segala bentuk sumbangan secara materi / finansial yang di tunjukkan masyarakat dengan pembelian bibit tanaman yang dilakukan secara swadaya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Madin, pembelian bibit dilakukan secara swadaya karena hasilnya juga dinikmati oleh petani sendiri.

Seluruh kegiatan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam program PHBM merupakan perwujudan tujuan dari PHBM menurut SK Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 yaitu memperluas akses masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan serta menerapkan tujuan dari kegiatan PHBM yaitu menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika masyarakat desa hutan

Adapun pendirian koperasi produksi petani hutan merupakan perwujudan dari strategi dalam PHBM yaitu penguatan ekonomi masyarakat desa hutan melalui lembaga ekonomi (koperasi).

c. Partisipasi dalam Pengambilan manfaat

Berkaitan dengan hasil apa yang didapatkan baik dari segi kualitas ataupun kuantitas. Hutan di Desa Bajulan mendapatkan dana sharing berupa kayu dan

non-kayu. Dana sharing tersebut diperuntukkan Perhutani kepada LMDH. Besarnya dana sharing tergantung dari hasil hutan dan luas petak lahan. Dana sharing yang diterima LMDH Wono Asri terakhir tahun 2012 dengan jumlah Rp. 53.000.000,-. Manfaat lain yang didapatkan masyarakat yaitu hasil tanaman pertanian yang sendiri yang di jual untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut merupakan perwujudan dari hak masyarakat desa hutan yaitu memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya.

d. Partisipasi Dalam Evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi yaitu berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, partisipasi warga dalam proses perencanaan program hanya terbatas pada program kerja LMDH dalam PHBM, sedangkan pelaksanaan program kerja PHBM oleh KPH Kediri lebih banyak dirancang oleh Perhutani karena mayoritas kegiatan telah ditentukan seperti penentuan petak lahan, jenis tanaman, dan bagi hasil.

Evaluasi dilaksanakan petugas Perhutani, Tenaga Pendamping Masyarakat bersama LMDH. Sesuai dengan Pedoman PHBM Plus 2009 tentang kegiatan supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan maksud untuk mengetahui pencapaian PHBM dengan cara membandingkan antara pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan .

Selain itu, partisipasi dalam PHBM juga terdapat kendala yang di hadapi seperti rendahnya kapasitas sumberdaya manusia tentang pemahaman pesanggem terhadap program PHBM sehingga perlu diupayakan peningkatan sumberdaya manusia di level bawah seperti LMDH / penyuluh lapangan instansi terkait.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Bajulan sudah tergolong baik yang dilihat dari partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff yaitu

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pelibatan unsur masyarakat dalam terbentuknya suatu lembaga, serta adanya sumbangsih pemikiran dari para anggota untuk memajukan suatu program/kegiatan.
- b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan meliputi kesediaan masyarakat untuk terlibat selama proses pelaksanaan juga sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari beragamnya bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat seperti partisipasi tenaga dalam pembersihan semak, pemanenan getah pinus, pengamanan hutan. Partisipasi harta benda dengan pembelian bibit secara swadanya oleh pesanggem.
- c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat juga sudah tergolong baik. Masyarakat mendapat porsi yang adil dalam pembagian lahan dan hasil. Selain itu, para pesanggem mengungkapkan mendapatkan tambahan penghasilan dari tanaman yang dikelolanya.
- d. Dari segi partisipasi dalam evaluasi, program PHBM di Desa Bajulan tergolong cukup. Pada tahap evaluasi, pihak yang berwenang menilai yaitu dari tingkat Perhutani KPH Kediri bersama Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Pada tahapan ini tidak adanya masyarakat yang berpartisipasi.

Walaupun secara umum Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk sudah tergolong baik, namun, masih terdapat beberapa kekurangan dan hambatan yaitu pada partisipasi dalam pengambilan keputusan dan evaluasi.

Dalam pengambilan keputusan terlalu didominasi oleh pihak perhutani dalam pembentukan perjanjian kerjasama dan lebih mengutamakan SOP daripada kebutuhan masyarakat. Seperti jenis tanaman pokok apa, jarak tanam, kedalaman lubang, yang semuanya di tentukan oleh Perhutani. Sedangkan hambatan lain yaitu kurangnya kesadaran dan sumberdaya masyarakat untuk memahami program PHBM secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat berguna untuk

peningkatan program terkait partisipasi masyarakat dalam program PHBM:

Kebijakan program PHBM lebih ditekankan kepada jiwa berbagi yang seharusnya. harusnya kebijakan lebih bersifat *bottom-up* sehingga kebijakan yang ada dapat mengakomodir kepentingan semua pihak serta tidak selalu mendikte masyarakat dalam segala tindakan yang pada akhirnya akan membatasi ruang gerak masyarakat.

Perlu dilakukan pendampingan secara bertahap untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat serta meningkatkan peran para pihak (termasuk Pemerintah melalui Dinas/Instansi terkait) dalam upaya mensukseskan partisipasi dalam PHBM termasuk dukungan alokasi dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Awang S.A., Wahyu T.W., Baiatul H., Ambar A., Ratih M.S., Solehudin dan Antonius N., 2008. *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan*. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Echols, John M and Hassan Shadily. 2000. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Fahrudin, Adi. 2001. *Pemberdayaan Partisipasi & Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung : Humaniora
- Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Adicita Kurniawan.
2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaruan
- Hadari, Nawawi.1987. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Hamid, Patilima. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*.

<http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-nganjuk-2013.pdf> (online) diakses 21 Juni 2015.

Koentjaraningrat. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.

Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*. Yayasan Obor Indonesia

Nasution, Zulkarnaen. 2009. *Solidaritas Sosial Partisipasi Masyarakat Desa Transisi*. Malang : UMM Pers Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Ndraha, T. 1990. *Pembangunan Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta : Rineka Cipta

Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama

Perusahaan Umum Perusahaan Hutan Negara Indonesia. 2009. *Keputusan Direksi Perum Perhutani Tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat*. Jakarta

Slamet, Y. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta : Sebelas Maret University Press

Soelaiman, Holil. 1980. *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung

Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.